

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Magister
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



**ARTANTYO BUDI NUGROHO
NPM :201003631010492**

Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

ARTANYO BUDI NUGROHO

20100363101492

Program Studi : Magister Administrasi Publik

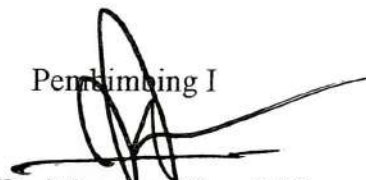
TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

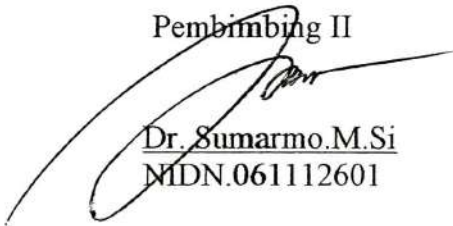
Semarang, 20 September 2022

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Munawar Noor, M.S
NIDK .8825280018

Pembimbing II


Dr. Sumarmo, M.Si
NIDN.061112601

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik


Dr. Tri Lestari Hadiati ., M.Si
NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN

Berdasarkan laporan panitia ujian tesis Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

Semarang, 20 September 2022

1. Dr. Munawar Noor.M.Si
Ketua Tim Penguji /Pembimbing
2. Dr. Sumarmo,M.Si
Penguji 1
3. Dr. Tri Lestari Hadiati,M.Si
Penguji 2




.....
.....
.....

Mengesahkan,

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SMARANG




Dr. Rini Werdiningsih, M.S
NIDN. 0621105901

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 2) Mendiskripsikan dan menganalisis Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 9 orang. Pengumpulan data menggunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi adalah keterlibatan partisipasi masyarakat, dengan mengikuti sosialisasi memberikan materi tentang perlindungan perempuan dan anak. Mengadakan workshop dengan cara praktek terhadap peserta salah satunya adalah informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Konsistensinya tetap dilaksanakan. Sumber Daya Sumber daya personil Perlindungan perempuan anaka sudah cukup memadai. Sarana penunjang kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan adalah nara sumber, dan anggaran dari APBD Kota Semarang. Disposisi/Sikap Pelaksana Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Struktur Birokrasi. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP).

Kata Kunci : Teori Kebijakan Publik, Lingkup Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan publik.